

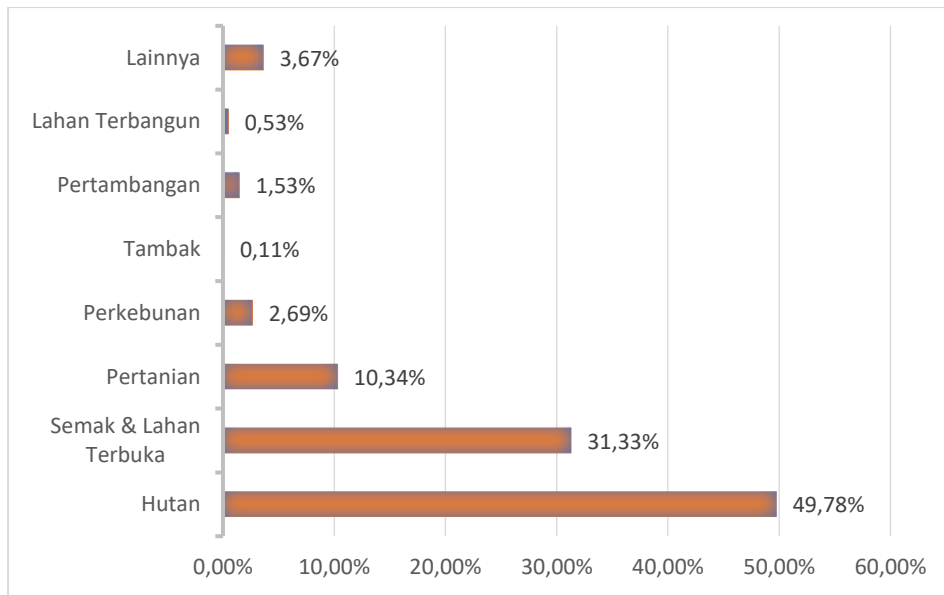
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang dalam skripsi ini adalah tumpang tindih perizinan yang terjadi di area konservasi Bukit Camang Kota Bandar Lampung. Permasalahan ini terjadi karena pada dasarnya pembangunan selalu dihadapkan dihadapkan dengan persoalan lingkungan, pembangunan dan prinsip-prinsip kelestarian alam dinilai sangat berbanding terbalik sehingga tidak akan pernah bersatu. Pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dikelola berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem, karena akibat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol akan berdampak pada lingkungan. Izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam relatif mudah untuk dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan secara baik dampak kedepannya terhadap lingkungan. Akibatnya seringkali pada tahap operasional pemanfaatan sumber daya alam tidak atau kurang mengindahkan kelestarian lingkungan.

Isu utama mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia selalu meningkat trennya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel yang menunjukkan jumlah lahan kritis yang tersebar di Indonesia serta perubahan lahan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan (hutan dan perbukitan) menjadi lahan bisnis.



Gambar 1.1 Presentase Perubahan Hutan tahun 2000-2011

Grafik tersebut menjelaskan bahwa potret lingkungan di Indonesia dari tahun ketahun semakin memprihatinkan. Tren kasus lingkungan ini terus meningkat seiring kebijakan daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing.

Menurut kutipan dari situs Kementerian Lingkungan Hidup bahwa pada tahun 2012 sudah ada 300 kasus lingkungan hidup seperti kebakaran hutan, pencernaan lingkungan, pelanggaran hukum dan pertambangan. Kasus tersebut menyumbang bertambahnya jumlah lahan kritis yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia seperti Kalimantan Tengah yang berkontribusi jumlah lahan kritis terbesar, diikuti Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara dan Lampung.

Laju percepatan pembangunan khususnya dibidang ekonomi berdampak pada terjadinya perubahan kegiatan dan struktur perekonomian dari yang semula mengandalkan sektor pertanian berubah ke sektor industri. Pada beberapa tahun terakhir ini pembangunan dan industri yang kurang terencana mulai menimbulkan kekhawatiran berkaitan dengan masalah kelestarian alam dan masalah lingkungan.

Berkenaan dengan hal di atas, maka keberhasilan pembangunan dapat berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berarti secara tidak langsung akan ikut meningkatnya daya beli masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, tetapi disisi lain ternyata juga menimbulkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara yang dihasilkan oleh limbah industri jumlahnya dari waktu ke waktu terus bertambah (Siagian, 2005; 28)

Bandar Lampung yang berstatus sebagai ibukota provinsi, tetapi 10,85% dari seluruh penduduk kota Bandar Lampung hidup di bawah garis kemiskinan (Sumber: BPS Lampung Tahun 2015). Kemiskinan yang melanda Provinsi Lampung menjadikannya sebagai Provinsi ke-3 termiskin di wilayah Sumatera. (Tingkat Kemiskinan Daerah Di Indonesia Tahun 2015 diakses dari <https://republika.co.id>). Fakta ini menunjukkan alasan mengapa masyarakat berpaling ke eksploitasi alam sebagai sarana pemenuh kebutuhan ekonomi, karena mereka merasa tidak memiliki pilihan lain untuk mendapat penghasilan.

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi idealnya menjadi contoh bagi daerah lain di Provinsi Lampung, akan tetapi dalam pengelolaan lingkungan hidup belum berhasil. Dimana kawasan konservasi di Kota Bandar Lampung telah mengalami kerusakan. Hal ini dibuktikan dengan data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, pada tahun 2008 ada 33 bukit, namun pada tahun 2018 hanya tersisa 19 bukit di Bandar Lampung. (Walhi Lampung, 2018)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Lereng, Bukit dan Gunung di Bandar Lampung dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 33 Tahun 1996, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung dikatakan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki 11 bukit sebagai kawasan konservasi yaitu; Gunung Sulah (Sukarame); Gunung Kunyi (Teluk Betung Selatan); Gunung Sari (Tanjung Karang Pusat); Gunung Kucing

(Tanjung Karang Barat); Gunung Banten (Kedaton); Gunung Perahu (Kedaton); Gunung Sukamenanti (Kedaton); Bukir Klutum (Tanjung Karang Timur); Bukir Randu (Tanjung Karang Timur) Bukit Kapuk (Tanjung Karang Timur) dan Gunung Camang (Tanjung Karang Timur).

Pemerintah menetapkan Bukit Camang sebagai area konservasi dengan 3 (tiga) fungsi yaitu 1. Sebagai paru-paru Kota Bandar Lampung, 2. Sebagai daerah resapan air guna memberikan pasokan air bagi warga Kota Bandar Lampung dan 3. Untuk melindungi tanah dibukit tersebut dari erosi. Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dinyatakan bahwa kawasan konservasi adalah kawasan yang dicegah dan dilarang untuk alih fungsi lahan kawasan lindung untuk kegiatan pertambangan, perumahan/pemukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang merusak kawasan lindung.

Bertolak belakang dengan peraturan pemerintah yang ada, masyarakat melihat area ini sebagai kesempatan untuk memperoleh pendapatan dengan cara menambang bebatuan dan pasir di daerah tersebut. Masyarakat penambang kemudian menjual bahan-bahan tersebut kepada perusahaan konstruksi yang sibuk membangun kompleks perumahan dan hotel berbintang di sekitar kota Bandar Lampung. Akibatnya, bukit tersebut menjadi rusak dan tidak dapat memenuhi fungsi ekologisnya. Dengan semakin meningkatnya curah hujan maka tanah longsor dapat menjadi bencana yang tidak diduga-duga.

Mengutip pernyataan yang diungkapkan oleh Wijatnika selaku Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI dalam situs media online antarlampung.com menyatakan bahwa:

Kerusakan Bukit di Kota Bandar Lampung dapat dibagi menjadi tiga tingkatan kerusakan, yakni; kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan parah. Adapun yang pertama kerusakan ringan adalah kerusakan yang belum mempengaruhi fungsi sebagai kawasan konservasi, seperti daerah penyangga dan resapan air, contoh; Gunung

Banten (Kec. Kedaton), Gunung Kucing (Kec. Tanjung Karang Barat) Kedua, tingkat kerusakan sedang; kerusakan yang mulai mempengaruhi bentuk dari bukit, misalnya; Bukit Randu (Kec. Tanjung Karang Timur) dan; Ketiga tingkat kerusakan parah; kerusakan yang tidak hanya mempengaruhi bentuk dari bukit tapi juga berdampak hilangnya fungsi sebagai kawasan konservasi karena lahan semakin tergerus oleh aktivitas manusia, misalnya; Bukit Camang (Kec. Tanjung Karang Timur), Gunung Kunyit (Kec. Teluk Betung Selatan), Gunung Sukamenati (Kec. Kedaton).

Pertambangan liar yang dilakukan itu bukan hanya untuk eksploitasi kekayaan alamnya melainkan untuk membangun perumahan di Bukit Camang tersebut. Kejadian yang ada ialah di Bukit Camang terdapat izin pembangunan perumahan dikawasan lindung wilayah konservasi. Hal ini menimbulkan kekacauan penataan ruang. Gunung Camang yang seharusnya kawasan dilindungi terlihat hijau menjadi telah mengalami kerusakan dari separuh total keseluruhan Gunung Camang. Selain pembangunan perumahan, kawasan konservasi Pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini sebagai instansi yang terkait yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tidak pernah mengeluarkan izin untuk dilakukannya penambangan di Gunung Camang.

Saat hujan lebat rawan terjadi longsor, air keruh disertai lumpur yang dapat mengalir dari sela-sela lereng Bukit Camang dari penggerusan proyek perumahan yang tidak terkendali mengakibatkan lumpur, batu, dan material longsor menimbun rumah milik warga yang menetap di lereng dan kaki bukit. Lokasi yang menjadi resapan air dibangun perumahan menyebabkan sering terjadi banjir disertai buruknya sistem drainase menjadi keluhan masyarakat perumahan. Padahal proses pembangunan perumahan seharusnya mementingkan aspek lingkungan dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan agar kawasan konservasi di Kota Bandar Lampung tetap terjaga.

Sampai saat ini WALHI hanya memberikan izin penambangan skala besar pada galian jenis C (batu, pasir, dan tanah) kepada lima perusahaan diantaranya adalah PT Budi Wirya dan PT Sari Karya yang menggali Bukit Panjang, PT Ganda Pahala yang

menggarap sebuah lereng di Jalan Soekarno-Hatta, Pt Batu Penjuru Makmur yang menambang Bukit Umbul Kunci, serta PT Batu Makmur yang mengeruk tanah dan batu Bukit Tirtayasa (WALHI Lampung).

Walhi Kota Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga teknis dan instrumen pengukur yang tepat dalam pemberian rekomendasi izin kegiatan yang hubungannya dengan lingkungan hidup di kota Bandar Lampung yang dibentuk oleh Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan lingkungan hidup, dan yang berhak memberikan pertimbangan dan rekomendasi izin setiap kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Sejalan dengan perkembangan waktu, mengingat banyaknya bukit-bukit di kota Bandar Lampung yang merupakan kawasan konservasi mengalami kerusakan yang cukup parah. Maka, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan semakin rusaknya kawasan koservasi yang seharusnya terbebas dari campur tangan aktivitas manusia. Evaluasi penitng dilakukan karena tidak semua kebijakan seperti kawasan konservasi ini meraih hasil yang diinginkan.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dalam menjaga kawasan konservasi di Kota Bandar Lampung memiliki arti penting untuk mengetahui sebab kegagalan maupun kendala yang dihadapi dari suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan sehingga dapat dijadikan sebuah pegangan untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan tersebut dimasa yang akan datang.

Alasan peneliti memilih kota Bandar Lampung, karena kota Bandar Lampung adalah Ibukota Provinsi Lampung. Statusya seharusnya dapat memberikan contoh pada daerah-daerah lain dalam upaya pelestarian lingkungan. Sedangkan pemilihan Bukit Camang sebagai lokasi penelitian dikarenakan bukit tersebut telah rusak hingga hampir

50 persen akibat ditambang, dan disisi lain berdirinya perumahan komersil di atas bukit tersebut juga mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam hal perizinan.

Bukit Camang merupakan kawasan konservasi sehingga pemerintah melarang kegiatan apapun di lokasi tersebut. Upaya penambangan saat ini dilakukan sudah demikian masif dan dikeluhkan warga sekitar. Penambangan ilegal itu telah berulang kali disorot oleh para pegiat lingkungan, seperti Walhi Lampung, namun aktivitas itu tetap berlangsung hingga sekarang. Padahal, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menegaskan bahwa penambangan itu tanpa izin. Sehubungan penambangan yang cenderung makin marak, banyak kalangan mengharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung bertindak tegas untuk menghentikan aktivitas tersebut.

Sejatinya, penelitian terdahulu terkait dampak kebijakan pertambangan memiliki fokus penelitian yang hampir sama yaitu untuk melihat dampak kebijakan dari pertambangan. Hal yang membedakan antara penelitian terlebih dahulu dengan yang peneliti lakukan sekarang adalah peneliti lebih ingin mengetahui faktor penyebab kebijakan pertambangan berdampak pada kerusakan lingkungan dilihat dari sisi ekonomi politik.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti merasa permasalahan yang diangkat menarik untuk diteliti, terkait fenomena kerusakan lingkungan yang merupakan dampak dari adanya aktivitas pertambangan di Bukit Camang akan melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Implementasi Kebijakan Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Bukit Camang Di Bandar Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pertambangan di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana dampak terhadap lingkungan hidup Bukit Camang di Kota Bandar Lampung?

3. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi permasalahan ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kebijakan pertambangan yang ada di Kota Bandar Lampung serta dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar Bukit Camang, untuk dapat mencari faktor-faktor yang menyebabkan adanya tumpang tindih kebijakan dan mengevaluasi langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan dapat memperkuat ilmu pengetahuan khususnya pada studi ilmu politik dan ilmu pemerintahan serta diharapkan dapat memberikan konsep pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang evaluasi sebuah kebijakan dalam pelaksanaannya dan juga dampaknya bagi masyarakat maupun lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kritik dan saran bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk lebih bijak lagi dalam membuat sebuah kebijakan dan juga selalu melakukan pengawasan dalam berjalannya kebijakan tersebut.

1.4.2.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai pelaksanaan dilapangan sebuah kebijakan yang ada dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang tidak berjalan tersebut.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan bagi warga tentang pentingnya memahami secara dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga kebijakan yang dibuat dapat terlaksana dengan seharusnya.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Evaluasi Dampak Kebijakan

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi dampak kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dunn dalam Winarno (2008:171-174) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan efektivitas sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat
- b) Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
- c) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
- d) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dialokasikan untuk membiayai program-program kebijakan publik.

- e) Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Tolak ukur yang berkaitan dengan evaluasi dapat dilihat berdasarkan pada tipe evaluasi menurut Dunn dalam Nugroho (2008:473) yaitu sebagai berikut:

- a) Efektivitas
- b) Efisiensi
- c) Kecukupan
- d) Perataan
- e) Responsivitas
- f) Ketepatan.

1.5.2 Politik Lingkungan

Banyak ilmuwan yang memberikan definisi tentang politik lingkungan (Herman Hidayat, 2005); Pertama, Peterson (2000) mengatakan bahwa politik lingkungan merupakan suatu pendekatan menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan manusia, dan antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat dalam skala dari individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan . Definisi ini menunjukkan perkawinan dua pendekatan kehidupan manusia, pendekatan lingkungan dengan pendekatan politik ekonomi. Artinya, dalam kesimpulan tertentu politik lingkungan dilihat sebagai pengaruh politik terhadap lingkungan hidup masyarakat.

Bryant dan Bailey (1992) mendefinisikan politik lingkungan sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik, kondisi dan menjadi jaringan dari pergantian lingkungan. Sedangkan Blaike dan brookfield melihat politik lingkungan sebagai suatu

bingkai untuk memahami kompleksitas saling berhubungan antara masyarakat lokal, nasional, politik ekonomi global dan ekosistem.

Sedangkan Vayda (1983) menjelaskan politik lingkungan adalah suatu metode terapan oleh ahli-ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan, ini yang dikenal sebagai “*progressive contextualization*” (kontekstualisasi yang maju). Pendekatan ini dimulai dengan aktor (pelaku), dalam hal ini para pemakai sumber daya alam yang langsung, dan mempertimbangkan suatu konteks apa mereka berbuat atau tidak berbuat dalam cara khusus terhadap suatu sumber daya alam.

Politik lingkungan adalah sama atas suatu metode terapan oleh ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan, ini yang dikenal dengan sebutan *progressive contextualization* (kontekstualisasi yang maju). Pendekatan ini dimulai dengan aktor (pelaku), dalam hal ini para pemakai sumber daya alam yang langsung, dan mempertimbangkan suatu konteks dengan apa mereka berbuat atau tidak berbuat dalam cara yang khusus terhadap sumberdaya alam. Pendekatan ini juga bermaksud untuk menerangkan mengapa masyarakat menggunakan lingkungan dalam cara-cara yang khusus, kadang-kadang menyebabkan sumberdaya berkurang atau rusak sehingga dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar (Herman Hidayat, 2005)

Dari beberapa definisi politik lingkungan menurut para ahli ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik lingkungan merujuk pada kajian intelektual tentang fenomena-fenomena lingkungan yang terjadi. Entah itu relasi antar masyarakat dengan lingkungan, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggapi masalah lingkungan, korelasi politik dengan lingkungan, atau pun *planning* (rencana) strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan dan bagaimana mengembangkan lingkungan hidup sebagai prioritas pelestarian negara.

1.5.3 Rent Seeking Behaviour

Konsep *Rent Seeking* digunakan dalam penelitian ini berdasarkan argumen peneliti bahwa ada proses alokasi Sumber Daya Alam di Bukit Camang Bandarlampung. Peneliti berasumsi bahwa setiap/kelompok berupaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya, seperti lobi, akan ditempuh untuk menggapai tujuan tersebut. Kelompok-kelompok bisnis dan perseorangan mencari Rente ketika mereka menggunakan kekuasaan Pemertintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumber daya yang dimiliki.

Pengertian *rent seeking* dalam teori publik adalah bisnis untuk memperoleh keuntungan dengan modal kekuasaan (Didik J Rachbini, 2006:119). Teori pilihan publik juga dapat menstransormasikan lebih jauh konsep dasar ilmu ekonomi ke dalam bidang politik. Dalam konsep dasar teori klasik, Adam Smith membedakan tiga bentuk pendapatn, yaitu keuntungan (*profit*), upah (*wage*), dan sewa (*rents*).

Berdasarkan konsep ekonomi, lalu diperoleh dengan pola investasi modal, keahlian dan berbagai investasi sumber daya alam yang mengandung resiko kerugian. Sementara upah merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh karena seseorang bekerja berdasarkan keahlian dan keterampilannya. Sedangkan sewa atau rente merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh dari sewa atas modal (uang, mesin, dll) yang merupakan milik sendiri.

Berdasarkan konsep politik, pelibatan sektor swasta dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik dilakukan dengan asumsi bahwa sektor swasta lebih efisien dibanding pemerintah. Namun krisis ekonomi yang melanda sejak 1998 membuktikan bahwa swasta Indonesia lebih rapuh dibanding pemerintah.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menyusun ruang lingkup dan batasan-batasan penelitian agar permasalahan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini tidak menyebar

dan tidak melenceng dari focus latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka teori pada skripsi ini. Operasionalisasi konsep penelitian ini meliputi:

1. *Evaluasi Dampak Kebijakan* adalah sebuah teori yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut., peneliti berfokus pada factor-faktor yang mempengaruhi tumpang tindih kebijakan di Bukit Camang Kota Bandar Lampung.
2. *Rent Seeking Behaviour* dari penjelasan tentang *rent seeking* peneliti berharap dapat menemukan jawaban atas kegiatan yang terjadi dan menemukan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kebijakan pertambangan di Bukit Camang Kota Bandar Lampung.

1.7 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, yang berarti ditujukan untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam melalui teknik-teknik pengambilan data tertentu.

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam,

mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016).

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk mendapatkan data primer penelitian akan dilakukan di daerah sekitar Bukit Camang Bandar Lampung, dan untuk data yang lebih rinci akan dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas ESDM Provinsi Lampung dan Walhi Kota Bandar Lampung dimana nanti dapat menemukan informasi tentang kebijakan–kebijakan tentang perizinan pertambangan di Bandar Lampung dan akan dilakukan di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung untuk menemukan data dan informasi lebih lanjut.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah informan, peneliti menetapkan informan dengan menggunakan *purposive sample*. Dimana informan yang peneliti pilih bukan secara random melainkan dengan tujuan tertentu. Peneliti juga akan menggunakan teknik *snowball sampling*. Nina Nurdiani (2014) mengatakan bahwa *snowball sampling* adalah metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metoda ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu. Pada penelitian teknik *snowball sampling* digunakan dimaksudkan apabila terdapat informan lain yang dibutuhkan untuk melengkapi data diluar informan yang telah ditetapkan.

1.7.4 Sumber Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian.

1.7.4.1 Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau biasa disebut dengan data asli. Data primer yang diperoleh peneliti dalam skripsi ini merupakan hasil wawancara dari informan dan hasil observasi fenomena dan permasalahan secara langsung.

1.7.4.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder ini sebagai penunjang dari data primer yang diperoleh. Data sekunder dapat diperoleh dari literatur, buku, jurnal, penelitian sebelumnya, analisis isi (*content analysis*) dan lain-lain.

1.7.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Perolehan data melalui metode wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur. Metode wawancara terstruktur ini yaitu pedoman wawancara yang disusun secara detail dan rinci, bentuknya merupakan pertanyaan check-list yang disiapkan peneliti untuk dijawab oleh informan. Dalam metode ini, peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban

yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Berikut daftar informan yang akan menunjang penelitian ini:

- a. Pemerintah Provinsi Lampung selaku pemegang kekuasaan tertinggi.
- b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung selaku dinas yang menaungi permasalahan dan perizinan pertambangan.
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung selaku dinas yang menaungi masalah lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan dan yang memegang perizinan terhadap area konservasi di Kota Bandar Lampung.
- d. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kota Bandar Lampung, selaku perpanjangan tangan dari DLH Provinsi dalam menangani permasalahan lingkungan hidup yang timbul akibat kegiatan di lingkungan atau lahan yang ada di Kota Bandar Lampung.
- e. Tokoh masyarakat di sekitar Bukit Camang selaku terdampak akibat kegiatan yang dilakukan di Bukit Camang.

2. Studi Literatur

Studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi antara teori dan praktik. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh didapatkan melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, dokumen, analisis isi (content analysis) dan literatur terkait lainnya.

1.7.5 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dari awal hingga akhir. Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

maka harus dilakukan analisis sejak penelitian dimulai. Berikut adalah proses analisis data penelitian:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan cara peneliti dalam meringkas inti data yang diperoleh dan memfokuskan hanya ke hal penting saja. Hal ini dibutuhkan karena jika tidak menggunakan reduksi data, pembahasan penelitian akan melebar lebih luas. Dengan melakukan reduksi data, peneliti akan memperoleh data yang sudah disederhanakan agar data tidak terkesan rumit dan tercampur dengan data yang lainnya. Peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak berhubungan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk menyederhanakan data, tetapi juga untuk memastikan bahwa data yang diolah adalah data yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian. (Siyoto, 2015).

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Langkah ini dikerjakan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang terorganisir, sehingga kesimpulan dapat ditarik. Pada tahap ini peneliti mencoba mengelompokkan dan menyajikan data sesuai topiknya, terlebih dahulu mengkodekan setiap sub pertanyaan. (Siyoto, 2015).

3. Kesimpulan

Hal terakhir yang dilakukan peneliti dalam tahap analisis data adalah menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh. Tahapan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.